

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keterwakilan politik merupakan aspek penting dalam sistem demokrasi karena menjadi sarana penyaluran aspirasi rakyat. Melalui sistem ini, individu atau kelompok masyarakat dapat terlibat dalam pengambilan keputusan politik secara tidak langsung. Keterwakilan menjembatani antara kepentingan warga negara dan proses legislasi dalam lembaga formal seperti parlemen. Dengan demikian, suara rakyat tetap terakomodasi meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan. Prinsip ini menjadi dasar bagi sistem demokrasi perwakilan di berbagai negara modern.

Menurut Robert A. Dahl, masyarakat memiliki hak untuk bergabung dalam kelompok atau partai politik guna memengaruhi pemerintah secara damai. Hak ini mencerminkan prinsip pluralisme politik dalam demokrasi modern. Keterlibatan dalam partai politik memungkinkan setiap kelompok menyuarakan kepentingannya secara sah dan konstitusional. Dalam konteks ini, partai politik menjadi media penting dalam mewujudkan representasi politik yang adil. Dahl menekankan bahwa representasi adalah inti dari partisipasi warga negara dalam sistem demokrasi (Dahl, 1989:233).

Keterwakilan politik adalah suatu sistem di mana masyarakat memberikan mandat kepada wakil-wakilnya untuk mengelola pemerintahan dan membuat keputusan politik atas nama mereka. Sistem ini berkaitan erat dengan demokrasi perwakilan, di mana rakyat tidak secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik, melainkan menyerahkan kewenangan tersebut kepada para perwakilan yang duduk di lembaga

legislatif maupun eksekutif (Budiarto, 2008:116-117). Dalam suatu negara demokrasi, keterwakilan politik berperan penting dalam mewujudkan aspirasi masyarakat. Sistem ini memastikan bahwa suara rakyat dari berbagai wilayah dapat tersampaikan. Mengingat keberagaman serta besarnya jumlah populasi, tidak memungkinkan bagi setiap individu untuk terlibat langsung dalam setiap keputusan politik. Oleh sebab itu, partisipasi serta aspirasi politik masyarakat difasilitasi melalui berbagai mekanisme keterwakilan yang memungkinkan individu maupun kelompok memperjuangkan hak mereka, baik dalam proses pemilihan maupun pencalonan sebagai wakil rakyat.

Kepentingan politik, baik yang bersumber dari individu maupun kelompok, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial, ekonomi, budaya, serta ideologi. Perbedaan latar belakang ini menciptakan keberagaman kepentingan yang diperjuangkan, misalnya oleh buruh, pengusaha, petani, atau kelompok minoritas. Kepentingan politik menjadi tujuan bagi kelompok-kelompok ini untuk menyuarakan hak serta aspirasi mereka agar memperoleh perhatian dalam kebijakan publik. baik yang didasarkan pada tujuan politik maupun persamaan etnis dan SARA, perlu disalurkan melalui sarana yang dapat menyuarakan serta memperoleh dukungan dari pemerintah maupun masyarakat luas. Beberapa jalur yang dapat digunakan untuk menyampaikan gagasan politik antara lain melalui media massa, masyarakat sipil dan Partai politik. setiap jalur yang di gunakan untuk mencapai kepentingan politik memiliki manfaat dan juga fungsi yang berbeda.

Bagi kelompok minoritas, keterlibatan dalam politik erat kaitannya dengan perjuangan mendapatkan hak yang setara, representasi yang lebih proporsional, serta perlindungan dari diskriminasi. Nilai-nilai yang dianut oleh kelompok minoritas sering

kali mencerminkan aspek suku, ras, budaya, dan faktor lain yang dalam konteks Indonesia dikenal sebagai SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan). Istilah ini menggambarkan keberagaman dalam masyarakat yang dapat memengaruhi dinamika sosial, politik, dan ekonomi suatu negara (Nasution, 2013:314).

Partai politik memiliki peran penting dalam menampung serta memperjuangkan berbagai kepentingan politik dengan wewenang dan posisi yang formal dalam pemerintah, partai politik merupakan instrumen yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat langsung baik untuk partisipasi maupun menyuarakan aspirasi masyarakat yang berasal dari latar belakang yang berbeda untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan (Bakir, 2016:8-9). Perkembangan partai politik di dalam sejarah mengalami perubahan yang sangat bertahap diawali dengan para kelompok politik di Inggris yang mendukung kekuatan Raja dan Gereja serta kelompok yang mendukung pembatasan kekuasaan raja dan supremasi hukum, kelompok politik ini pun berubah menjadi sebuah partai politik yang diantaranya ialah Partai Tories (*Tory*) yang menjadi pendukung kekuatan raja dan Partai *Whig* menjadi pendukung pembatasan kekuatan raja serta kebebasan dalam beragama (Sagar, 2024:125-131). perubahan yang mengeser sistem otoritarian (monarki absolut) menjadi sebuah sistem yang mengutamakan perwakilan bagi rakyat menjadikan titik awal perkembangan partai politik terutama partai politik modern di dunia.

Fase partai kader merupakan tahap awal bagian dalam sejarah perkembangan partai politik modern yang muncul pada abad ke-19 di tengah perubahan sistem politik dari monarki absolut menuju monarki konstitusional dan sistem parlementer. kemunculan fase

ini ditandai oleh terbatasnya hak pilih yang hanya diberikan kepada laki-laki pemilik properti atau golongan elit borjuis. Dalam konteks tersebut, partai politik belum berfungsi sebagai wadah partisipasi rakyat secara luas, melainkan sebagai aliansi elit yang bertujuan untuk memenangkan kursi di parlemen dan mengamankan pengaruh politik. Partai kader bersifat eksklusif, terdiri dari sekelompok kecil tokoh berpengaruh, dan tidak memiliki struktur organisasi yang melibatkan massa atau sistem kaderisasi yang mapan (Duverger, 1954:21-28).

Fase partai massa, merupakan perkembangan yang ditandai dengan adanya kebebasan bagi setiap masyarakat untuk menggunakan hak pilih dan ikut dalam sistem pemilihan yang membuat mobilisasi masyarakat menjadi lebih terorganisir sesuai dengan kelompok tertentu. Menurut Seymour Martin Lipset dan Stein Rokkan, masa partai massa dimulai karena muncul dan mengerasnya *cleavage* atau garis pemisah sosial yang terbentuk akibat transformasi besar dalam sejarah Eropa, khususnya Revolusi Nasional dan Revolusi Industri. Kedua revolusi ini menciptakan konflik sosial-politik yang tajam di tengah masyarakat, dan partai massa muncul untuk merepresentasikan serta mengorganisir kelompok-kelompok sosial tertentu yang sebelumnya tidak memiliki saluran politik (Lipset & Rokkan, 1967:8-9).

Perkembangan fase partai modern terjadi setelah masa perang dunia selesai, transformasi masyarakat berubah dengan menjauhi nilai-nilai ideologi yang dapat dianggap dapat melahirkan ekstremis ideologi seperti pada masa perang dan awal kebangkitan masa partai politik massa melainkan berfokus kepada sebuah reformasi dan pragmatisme yang membuat partai massa yang sebelumnya berbasis ideologi berubah

menjadi sebuah partai menangkap semua kalangan (*catch-all party*) dengan isu-isu yang lebih aktual dan berfokus kepada fenomena politik yang sedang terjadi, menjadi tanda berkembangnya masa partai politik modern yang bersifat pragmatis, moderat, dan terbuka. Menurut Otto Kirchheimer, masa partai modern dimulai ketika partai politik mengalami transformasi menjadi *catch-all parties* setelah Perang Dunia II. Ciri utama masa ini adalah pragmatisme, pelemahan ideologi, dan orientasi elektoral luas, yang menggantikan sifat ideologis dan kaderisasi kuat dari partai massa sebelumnya (Kirchheimer, 1966:190-195).

Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa partai politik memainkan peran besar dalam membentuk kebijakan, prinsip, serta ideologi yang bertujuan menarik anggota untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan, baik yang terjadi di dalam kelompok masyarakat maupun yang dihadapi bangsa secara keseluruhan. Selain itu, partai politik juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk melakukan gerakan sosial dalam menyuarakan aspirasi mereka di pemerintahan serta mewakili kepentingan kelompok tertentu melalui jalur politik. Partai politik di Indonesia berkembang dalam dua kategori utama, yaitu partai nasionalis dan partai berbasis agama. Partai nasionalis berpegang pada prinsip nasionalisme, sekularisme moderat, Marhaenisme, anti-kolonialisme, serta demokrasi sosial. Beberapa partai yang mewakili kelompok nasionalis antara lain PNI, PKI, dan IPKI. Partai-partai ini menjadi wadah bagi kelompok nasionalis dalam membangun Indonesia sebagai negara yang menekankan persatuan nasional, kedaulatan negara, serta pembangunan yang tidak didasarkan pada etnis atau unsur SARA tertentu,

melainkan pada semangat nasionalisme bagi seluruh bangsa Indonesia (Castles, 1988:7-14).

Dalam perjalanannya, terjadi interaksi serta dinamika antara partai nasionalis dan partai berbasis agama. Banyaknya partai politik di Indonesia memberikan dorongan bagi kelompok keagamaan untuk terlibat dalam politik guna memperjuangkan nilai-nilai agama dalam pemerintahan, tetapi tetap dalam koridor demokrasi. Oleh sebab itu, partai-partai berbasis agama hadir sebagai wadah bagi kelompok religius untuk menyuarakan kepentingan mereka. Beberapa partai politik berbasis agama yang muncul di Indonesia meliputi Masyumi, NU, PSII, Partai Katolik, dan Parkindo. Setiap partai memiliki visi dan misi yang berlandaskan nilai-nilai agama tertentu guna mengusung aspirasi religius dalam pemerintahan serta mewakili komunitas keagamaan masing-masing. (Budiarjo, 2008:441)

Perkembangan partai politik di Indonesia mengalami pasang surut yang dipengaruhi oleh dinamika politik nasional. Sejak masa pergerakan nasional hingga era reformasi, setiap keputusan dan kesepakatan politik yang terjadi merupakan hasil kompromi antar partai politik. Partai politik di Indonesia mengalami proses penyederhanaan, terutama pada era Demokrasi Terpimpin. Hal ini terjadi karena keberagaman partai politik dianggap berpotensi memicu instabilitas politik dan sering menyebabkan perpecahan kekuatan dalam setiap pergantian kabinet pada masa Demokrasi Parlementer. Sebagai upaya menata sistem politik, Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959, yang merupakan tindak lanjut dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan mengembalikan

Indonesia ke UUD 1945. Akibat dari penetapan ini, hanya 10 partai yang diakui pemerintah, yaitu PKI, PNI, NU, Partai Katolik, Partindo, Parkindo, Partai Murba, PSII Arudji, IPKI, dan Partai Islam Perti, sementara Masyumi dan PSI dibubarkan pada tahun 1960 (Budiarjo, 2008: 440-441).

Dalam masa demokrasi terpimpin partai-partai masih terbagi antara nasionalis dan juga religius, Pada masa Demokrasi Terpimpin, partai-partai berbasis agama menghadapi tantangan besar karena kebijakan sentralisasi kekuasaan oleh Soekarno dan meningkatnya pengaruh PKI. Beberapa partai, seperti NU, Partai Katolik, dan Parkindo, tetap berperan dalam pemerintahan, sementara Masyumi dibubarkan karena sikap oposisi terhadap rezim. Peran utama partai agama dalam periode ini adalah menyesuaikan diri dengan kebijakan negara, menjaga kepentingan umat beragama, serta berusaha menjadi penyeimbang dalam dinamika politik yang semakin dikuasai oleh Soekarno dan PKI. Setelah terjadi Gerakan Gestapu-PKI Tahun 1965, yang memberikan dampak kepada turunnya Presiden Soekarno membuat seluruh partai politik harus melakukan penyederhaan partai politik yang lebih terintegrasi menjadi satu yang membuat hilangnya beberapa ideologi partai politik sesuai dengan yang mereka inginkan, pengelompokan ini dibagi menjadi tiga diantaranya; Golongan Nasional, Golongan Karya dan Golongan Spiritual pada tahun 1971. Dalam proses menjadikan partai-partai ini menjadi satu, pengelompokan baru yang terjadi pada tahun 1973 menghasilkan partai politik baru bukan sebuah koalisi melainkan partai-partai berlatar belakang Islam yang menjadi satu partai politik baru, Nahdatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia dan Persatuan

Tarbiyah Islamiyah (Perti) bergabung menjadi partai baru yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (Heri Subagja, 2021:114-115).

Pergantian kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto pun terjadi. Adapun hingga pemilu 1971 Parkindo masih eksis dalam mengikuti pesta demokrasi. Parkindo mampu meraih 733.359 suara dan mampu menghantarkan tujuh perwakilannya di DPR RI. Kondisi politik kemudian berubah ketika Soeharto mengeluarkan kebijakan Fusi pada 1973. Partai-partai kemudian disederhanakan dengan tujuan agar dapat menciptakan stabilitas politik pada kehidupan berbangsa maka bagi Partai Politik dan Kristen yang memiliki latar belakang Kristen harus bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang diantaranya; Partai Katolik dan Partai Kristen Indonesia (Utama, 2023:2).

Setelah terjadinya pengelompokan dan Bersatunya partai politik yang berlatar belakang keagamaan menjadi satu partai baru ataupun bersatu dengan partai yang lebih besar, orang Kristen sudah tidak memiliki lagi partai politik yang secara jelas mendukung nilai-nilai Kristen dalam politik, sehingga seluruh politisi yang memiliki latar belakang beragama Kristen berbaur dengan partai-partai nasionalis untuk terus terlibat aktif dalam dunia politik hingga masa reformasi dan seterusnya. banyak partai politik yang berperan aktif dalam mengusungan suatu gagasan baik untuk keperluan nasional, pluritas bangsa, keterwakilan politik dan juga urusan spiritual atau kepercayaan, dengan berbagai latar belakang ini, orang Kristen yang menjadi pejabat publik ataupun yang mencalonkan diri menjadi pejabat publik dari suatu partai menjadi bukti adanya peran umat Kristen dalam dunia politik, walaupun memang tidak ada partai politik yang secara besar ataupun ada

di dalam partai politik yang menggunakan nilai-nilai ajaran Kristen dalam prinsip Partainya.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hadir dalam kancah politik nasional sebagai manifestasi dari kejenuhan publik terhadap partai politik tradisional dan minimnya representasi pemuda dalam pengisian jabatan publik pasca-Pemilu 2014. Didirikan secara resmi pada 16 November 2014 oleh sekelompok aktivis dan tokoh muda, PSI mengonseptualisasikan dirinya sebagai "partai anak muda" dengan mengusung platform progresif yang bertumpu pada dua pilar utama, yaitu anti-korupsi dan anti-intoleransi. Ideologi partai ini berakar pada nilai-nilai Pancasila yang dikombinasikan dengan prinsip sosial-demokrasi kontemporer, di mana keterbukaan, meritokrasi, dan kesetaraan menjadi basis dalam perekrutan kader tanpa ketergantungan pada patronase politik tradisional.

Dalam perkembangannya PSI tidak hanya memanfaatkan media digital secara masif untuk menjangkau konstituen milenial dan Gen Z, tetapi juga aktif melakukan pengawasan kritis terhadap tata kelola pemerintahan, seperti yang ditunjukkan oleh fraksinya di DPRD DKI Jakarta setelah Pemilu 2019. Memasuki dinamika politik Pemilu 2024 di bawah kepemimpinan Kaesang Pangarep, partai ini secara strategis memposisikan diri sebagai loyalis dan penerus arah kebijakan Presiden Joko Widodo. Dengan karakteristiknya yang vokal, adaptif terhadap kultur populer, dan konsisten menolak politisasi identitas, PSI merepresentasikan upaya dekonstruksi terhadap status quo politik Indonesia, sekaligus menawarkan model gerakan elektoral baru yang berbasis pada penguatan kepemimpinan muda dan transparansi kelembagaan.

Tabel 1.1 Jumlah Calon Legislatif Beragama Kristen di seluruh Partai Politik

No	Nama Partai	Jumlah Caleg keseluruhan	Jumlah Caleg Kristen
1.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	106	48
2.	Partai Perindo	106	39
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	106	26
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	106	21
5.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	44	20
6.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	104	18
7.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	106	15
8.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	106	13
9.	Partai Buruh	98	11
10.	Partai Demokrat	106	8
11.	Partai Amanat Nasional (PAN)	106	4
12.	Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)	21	3
13.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	99	1
14.	Partai Bulan Bintang (PBB)	37	1
15.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	106	0
16.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	106	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	106	0
18.	Partai Ummat	84	0
Total		1818	228

Sumber: KPU, 2024

Keterlibatan orang Kristen dalam dunia politik dapat terlihat melalui salah satu partai di Indonesia yang banyak mengusung calon legislatif berlatar belakang Kristen, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Berdasarkan data Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2024, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tercatat sebagai partai politik dengan keterwakilan calon legislatif (caleg) beragama Kristiani terbanyak, yaitu mencapai 48 orang. Puluhan caleg tersebut tersebar secara merata di seluruh wilayah kompetisi (Dapil 1 hingga Dapil 10), dengan titik konsentrasi tertinggi berada di Dapil 5

dan Dapil 9 yang masing-masing menempatkan 7 orang caleg. Posisi kedua ditempati oleh Partai Perindo yang mengusung total 39 caleg beragama Kristiani. Sama seperti PSI, Partai Perindo juga berhasil mengisi seluruh Dapil yang tersedia di DKI Jakarta, di mana keterwakilan puncaknya berada di Dapil 2 dan Dapil 9 dengan masing-masing menempatkan 6 orang caleg. kelompok partai nasionalis besar seperti PDI Perjuangan (PDIP) dan Golkar mengamankan posisi berikutnya dengan masing-masing mengusung 26 caleg dan 21 caleg beragama Kristiani. Keterwakilan caleg Kristiani dari PDIP terlihat menonjol di Dapil 10 sebanyak 5 orang, namun terpantau kosong di Dapil 3. Sebaliknya, Partai Golkar menunjukkan sebaran yang lebih konsisten di seluruh wilayah dengan jumlah tertinggi berada di Dapil 4 sebanyak 4 orang caleg. Fenomena kontras justru terlihat pada kelompok partai berbasis massa Islam atau yang memiliki platform spesifik, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat, di mana keempat partai tersebut sama sekali tidak memiliki caleg beragama Kristiani di seluruh wilayah Daerah Pemilihan DKI Jakarta (KPU,2024).

Secara nasional di Indonesia, pertimbangan umat Kristen dalam mendukung PSI berpusat pada pencarian keamanan atas hak-hak mereka sebagai kelompok minoritas, yang mana hal ini sangat klop dengan ideologi anti-intoleransi yang diajakan oleh PSI. Bagi masyarakat Kristen di berbagai daerah, isu-isu krusial seperti diskriminasi, sulitnya izin pendirian rumah ibadah, hingga maraknya politik identitas adalah ancaman nyata yang butuh pembelaan instan. Di saat partai nasionalis konvensional sering kali memilih jalan kompromi demi menjaga basis massa mayoritas, PSI justru tampil berani dan tanpa

basa-basi pasang badan menentang hal-hal berbau intoleransi tersebut. Keberanian frontal inilah yang membuat banyak pemilih Kristen, terutama kelompok kelas menengah dan kaum muda di kota-kota besar Indonesia, merasa bahwa PSI adalah wadah taktis yang paling andal untuk mengamankan hak kebebasan beragama mereka di parlemen. (Madrin, 2022)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi calon legislatif pada pemilihan legislatif tahun 2024 di DKI Jakarta yang memilih Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai sarana politik mereka untuk mendapatkan kursi di parlemen DPR dan juga DPRD, serta proses kaderisasi anggota Partai Solidaritas Indonesia bagi masyarakat yang beragama Kristen yang bergabung di partai tersebut. dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan bagi Ilmu Politik dan juga memberikan wawasan terkait peran orang Kristen sebagai kaum minoritas yang terlibat di dalam dunia politik untuk memperjuangkan hak bagi orang Kristen.

1.2 Rumusan Masalah

Pemilihan Legislatif tahun 2024 di DKI Jakarta menjadi arena kontestasi politik untuk mewujudkan kepentingan dari setiap anggota calon legislatif dan juga partai politik yang bersaing dipemilihan untuk mewujudkan apa yang mereka tuju sebagai gagasan mereka, partisipasi dalam partai politik terutama bagi calon legislatif yang beragama Kristen menjadi hal yang penting untuk melihat partisipasi umat Kristen dalam dunia politik di dalam pemilihan calon legislatif DKI Jakarta Tahun 2024.

Partai Solidaritas Indonesia merupakan partai politik yang terbentuk pada tahun 2014 yang secara aktif mewujudkan nilai-nilai anti-korupsi, anti-intoleransi, dan pluralisme. PSI berkomitmen menjadi wadah politik yang inklusif, terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang suku, agama, atau gender, PSI secara aktif mengampanyekan politik bersih, transparansi, serta perlawanan terhadap praktik korupsi melalui berbagai saluran komunikasi, terutama media sosial (Rohman, 2023:85-102).

PSI merupakan partai politik yang mendeklarasikan dirinya sebagai partai terbuka, non-sektarian, dan tidak berafiliasi dengan ideologi agama tertentu. Namun dalam praktik politik, PSI menampilkan banyak kader dan calon legislatif yang berasal dari kalangan Kristen, terutama di wilayah-wilayah dengan populasi pemilih Kristen (Katolik dan Protestan) yang signifikan seperti DKI Jakarta. Fenomena terlihat dengan adanya individu-individu Kristen memilih PSI sebagai kendaraan politik, meskipun partai ini tidak mengusung nilai-nilai Kekristenan secara eksplisit.

Tabel 1.2 Jumlah Calon Legislatif Partai Solidaritas Indonesia dalam Pemilihan Legislatif DKI Jakarta 2024 Yang Beragama Kristen (Katolik dan Protestan) DPRD Provinsi

Dapil	Jumlah Total Caleg	Jumlah Caleg Kristen	Persentasi Caleg Kristen
Dapil 1	12	4	33%
Dapil 2	9	6	66%
Dapil 3	9	6	66%
Dapil 4	10	4	40%
Dapil 5	10	7	70%
Dapil 6	10	3	30%
Dapil 7	10	3	30%
Dapil 8	12	4	33%
Dapil 9	12	7	58%
Dapil 10	12	4	33%
Total	106	48	45%

Sumber : Komisi Pemilihan Umum, 2024

Data pencalonan diatas memperlihatkan tingkat keterwakilan caleg Kristen yang sangat signifikan, yakni mencapai 45% dengan akumulasi 48 caleg Kristen dari total 106 caleg yang tersebar di sepuluh Daerah Pemilihan (Dapil). Jika dilihat lebih rinci per wilayah, sebaran caleg Kristen ini terbilang variatif namun cenderung dominan di beberapa dapil tertentu, seperti Dapil 5 yang mencatatkan persentase tertinggi sebesar 70% (7 dari 10 caleg), diikuti Dapil 2 dan Dapil 3 masing-masing sebesar 66% (6 dari 9 caleg), serta Dapil 9 dengan 58% (7 dari 12 caleg), sehingga di empat wilayah ini mereka berhasil menguasai lebih dari separuh porsi pencalonan yang tersedia. Sementara itu, wilayah-wilayah selebihnya menunjukkan komposisi yang lebih berimbang hingga berada pada tingkat keterwakilan minimum, seperti Dapil 4 yang tampil proporsional di angka 40% (4 dari 10 caleg), serta Dapil 1, Dapil 8, dan Dapil 10 yang memiliki pola identik dengan mengisi tepat sepertiga kekuatan wilayah sebesar 33% (4 dari 12 caleg). Adapun tingkat keterwakilan paling rendah berada di Dapil 6 dan Dapil 7, di mana caleg Kristen hanya menyusun 30% atau masing-masing 3 caleg dari total 10 kandidat, yang secara umum mengindikasikan adanya pemusatan strategi pencalonan yang kuat di zona-zona tertentu dengan tetap menjaga batas keterwakilan minimal sebesar 30% di wilayah lainnya.

Kecenderungan umat Kristen maupun elit politik berlatar belakang Kristen di DKI Jakarta dalam menentukan pilihan pada PSI sangat erat kaitannya dengan komitmen ideologis partai ini yang sejak awal konsisten mengusung narasi pluralisme, kesetaraan hak, dan penolakan keras terhadap segala bentuk intoleransi serta politisasi agama. Bagi kelompok minoritas, gagasan tersebut bukan sekedar jargon politik, melainkan jaminan kenyamanan dan perlindungan konkret dalam kehidupan bernegara, terutama di tengah

dinamika politik urban seperti di Jakarta yang kerap diwarnai isu sentimen keagamaan. Ditambah lagi dengan platform politik PSI yang modern, transparan, dan berani mendobrak gaya berpolitik lama, tak heran jika banyak figur serta pemilih Kristen merasa menemukan wadah perjuangan yang selaras demi memastikan hak-hak kebebasan beragama mereka tetap terjaga di parlemen. (Madrin, 2022)

Perolehan kursi legislatif PSI yang relatif rendah di tingkat DKI Jakarta pada Pemilu 2024 menjadi titik balik penting untuk mencermati kembali potret keterwakilan kandidat yang diterjunkan ke masyarakat. Formasi caleg di tingkat akar rumput memegang peranan besar dalam menentukan hidup-matinya suara partai di tengah masyarakat Jakarta yang plural. Oleh karena itu, sebagai bahan kajian mengenai struktur pencalonan yang telah berjalan, berikut adalah tabel data jumlah total caleg, sebaran caleg Kristen terpilih di sepuluh Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta sebagai berikut ;

Tabel 1.3 Jumlah Calon Legislatif terpilih di PSI dan Jumlah Calon Legislatif Kristen Terpilih

Dapil	Jumlah Caleg Terpilih	Caleg Kristen Terpilih
Dapil 1	1	0
Dapil 2	1	0
Dapil 3	1	1
Dapil 4	1	1
Dapil 5	1	1
Dapil 6	0	0
Dapil 7	0	0
Dapil 8	1	1
Dapil 9	1	1
Dapil 10	2	1
Total	8	6

Sumber: Komisi Pemilihan Umum, 2025

Berdasarkan data tabel tersebut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berhasil mengamankan total 8 kursi di DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2024, di mana aspek demografi

sosiologisnya memperlihatkan dominasi kuat legislator berlatar belakang Kristen yang mengisi 6 dari total 8 kursi (75%) yang dimenangkan. Pola spasial menunjukkan keterwakilan Kristen mutlak (100% dari kursi didapat) terjadi di Dapil 3, Dapil 4, Dapil 5, Dapil 8, dan Dapil 9 yang masing-masing menyumbang 1 kursi, sementara Dapil 10 sebagai wilayah tersukses dengan raihan 2 kursi menunjukkan komposisi berimbang karena diisi oleh 1 caleg Kristen dan 1 caleg non-Kristen. Sebaliknya, kursi yang dimenangkan di Dapil 1 dan Dapil 2 tidak diisi oleh caleg Kristen, sedangkan Dapil 6 dan Dapil 7 sama sekali tidak menghasilkan kursi parlementer bagi partai

Partai Solidaritas Indonesia dalam menarik calon legislatif yang beragama Kristen untuk berperan aktif dalam dunia politik, proses rekrutmen kandidat oleh PSI memiliki daya tarik sosiopolitik yang kuat melalui penerapan sistem *open recruitment* (rekrutmen terbuka) tanpa mahar politik yang melibatkan panelis independen serta uji kompetensi secara transparan, sebuah terobosan yang mendobrak tradisi penunjukan tertutup oleh elite parpol tradisional. Pendekatan berbasis meritokrasi ini secara strategis dirancang untuk menjaring figur-figur muda, perempuan, dan aktivis yang memiliki kapasitas intelektual namun minim modal finansial, memanfaatkan platform digital dan kultur populer untuk menyeleksi kandidat secara inklusif. Di dalam pemilihan Legislatif DKI Jakarta pada tahun 2024 adanya calon legislatif menggunakan Partai Solidaritas Indonesia di tingkat DKI Jakarta Sebagai kendaraan politik mereka.

Penelitian ini sendiri berfokus pada faktor yang mempengaruhi caleg Kristen untuk bergabung ke dalam Partai PSI dan maju di kontestasi politik pemilihan legislatif tahun 2024 serta memahami bagaimana rekrutmen caleg yang dilakukan oleh PSI terhadap

calon legislatifnya dengan memahami prosuder dan juga sistem pelaksanaaakn di dalam Partai tersebut.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang digunakan untuk melakukan analisis dan juga menemukan kesimpulan;

1. Faktor yang mempengaruhi kandidat Beragama Kristen dalam pemilu legislatif DKI Jakarta tahun 2024 memilih PSI sebagai partai politik pengusung?
2. Bagaimana proses rekrutmen dan kaderisasi anggota yang Beragama Kristen oleh PSI?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Akademik

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kandidat Beragama Kristen dalam pemilu legislatif DKI Jakarta tahun 2024 memilih PSI sebagai partai pengusung.
2. Untuk mengetahui proses rekrutmen dan kaderisasi Partai Solidaritas Indonesia terhadap Orang Kristen yang ada di DKI Jakarta

1.4.2 Tujuan Praktis

1. Membantu peneliti, akademisi, dan pengamat politik memahami dinamika keterlibatan politisi Kristen dalam PSI, serta bagaimana proses rekrutmen dan

kaderisasi yang dilakukan partai dapat berkontribusi pada keterwakilan politik kelompok tersebut.

2. Memberikan referensi bagi partai politik lain dalam memahami faktor yang menarik kelompok Kristen untuk bergabung, sehingga dapat digunakan untuk merancang strategi rekrutmen yang lebih inklusif.
3. Sebagai syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar sarjana.

1.5 Signifikansi Penelitian

1.5.1 Signifikansi Akademis

Penelitian ini berkontribusi pada kajian ilmu politik, khususnya dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi preferensi politik kandidat Kristen dalam memilih PSI sebagai platform politik mereka. Selain itu, penelitian ini turut memperkaya wacana mengenai keterwakilan politik kelompok minoritas agama dalam sistem kepartaian di Indonesia.

Penelitian ini menambahkan referensi mengenai rekrutmen dan kaderisasi partai politik dalam membangun lingkungan yang lebih inklusif bagi berbagai kelompok agama. Pentingnya penelitian ini terletak pada upayanya dalam menyoroti peran partai politik sebagai sarana bagi umat Kristen untuk menyalurkan aspirasi dan hak suara mereka dalam pemerintahan, khususnya di lembaga legislatif.

1.5.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini menyediakan informasi bagi calon legislatif Kristen yang ingin berkiprah di dunia politik mengenai berbagai faktor yang memengaruhi keputusan

mereka dalam memilih partai politik seperti tujuan masuk dalam partai, apa yang harus diperjuangkan sebagai umat Kristen dan gagasan partai seperti apa yang harus diikuti untuk menjamin hak bagi kaum minoritas. penelitian ini dapat menjadi referensi bagi partai politik lain dalam memahami pola keterlibatan politisi Kristen serta merancang strategi yang efektif untuk menarik dan mempertahankan kader dari kelompok tersebut.

1.6 Kajian Pustaka

Bagian kajian pustaka ini dihadirkan untuk menelaah berbagai rekam jejak penelitian terdahulu yang memiliki relevansi tema dengan penelitian ini. Penelusuran terhadap beberapa jurnal dan karya ilmiah terdahulu sangat penting, bukan hanya untuk memperkaya khazanah informasi, tetapi juga untuk memetakan di mana posisi penelitian ini berada sekaligus melihat celah (gap) yang belum tersentuh oleh para peneliti sebelumnya.

Tabel 1.4 Kajian Pustaka

No	Penulis/ Judul Penelitian/ Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Suhana Saad, Lyndon N., S. Selvadurai, M. S. Sarmila, R. Zaimah, A. M. Azima <i>Malay Politics and Nation State in Malaysia</i> Metode Kualitatif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa <i>United Malays National Organisation</i> atau UMNO diposisikan sebagai instrumen politik utama bagi elit politik dan legislatif Melayu dalam mempertahankan kepentingan politik, ekonomi, dan simbolik mereka. UMNO berperan sebagai representasi utama kepentingan politik Melayu, sehingga dukungan elit dan legislatif Melayu terhadap partai tersebut bersifat struktural dan ideologis, bukan sekadar pilihan politik individual. pembentukan ini terjadi didasari pada faktor kesamaan identitas sosial sebagai sesama etnis melayu, faktor ideologi yang berbasis <i>ethno-nationalist</i> dan sejarah pembentukan Negara Malaysia yang berbasis pada politik etnis melayu.

2	Darwis, Sasterio <i>Identity as a Means of Recruitment for Political Parties and the Influence of Leaders in Sigi Regency, Central Sulawesi Province</i> Metode Kualitatif	Dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa perekrutan kandidat oleh partai politik di Kabupaten Sigi sangat dipengaruhi oleh faktor identitas sosial, terutama latar belakang agama kandidat. Partai politik lebih mengutamakan figur yang memiliki kedekatan dengan komunitas lokal karena dinilai mampu menarik simpati dan dukungan masyarakat secara lebih efektif. Dalam praktiknya, kandidat yang direkrut tetap dipahami oleh pemilih sebagai bagian dari kelompok identitas keagamaan tertentu, meskipun representasi tersebut tidak selalu disampaikan secara eksplisit. Selain itu, studi ini menemukan bahwa pengaruh personal dan ketokohan kandidat memiliki peranan yang lebih besar dalam menentukan pilihan masyarakat dibandingkan dengan ideologi maupun afiliasi partai politik, sehingga strategi perekrutan partai cenderung bersifat pragmatis dan berbasis identitas.
3	Shyam Singh <i>Dalit Movement and Emergence of the Bahujan Samaj Party</i> Metode Kualitatif	Pada penelitian ini memberikan penjelasan bahwa elit politik ataupun calon legislatif di India yang berasal dari kasta dalit, yaitu strata sosial di India terbawah bergabung ke dalam <i>Bahujan Samaj Party</i> partai politik mendukung representasi kaum kasta dalit dan memperjuangkan mereka dalam politik sehingga dukungan ini bersifat dan berlandaskan kesamaan identitas sosial yang berangkat dari kaum dalit yang termarginal sehingga menarik elit politik dan calon legislatif dari kelompok tersebut karena keselarasan antara identitas sosial mereka dan orientasi ideologis partai.

4	Rafaela Dancygier <i>The Left and Minority Representation: The Labour Party, Muslim Candidates, and Inclusion Tradeoffs</i> Metode Kuantitatif	preferensi politik pemilih Muslim di Inggris menunjukkan kecenderungan kuat untuk secara disproporsional mengidentifikasi diri dan memberikan dukungan kepada partai-partai beraliran kiri seperti Partai Buruh. Di tingkat lokal, kelompok pemilih ini memprioritaskan identitas keagamaan mereka di atas identitas lainnya dan memiliki tingkat partisipasi (<i>turnout</i>) yang sangat tinggi di tempat pemungutan suara, yang didorong dan diperkuat oleh kapasitas mobilisasi dari jaringan etnis serta komunitas mereka. Ketika populasi Muslim di suatu daerah pemilihan (<i>ward</i>) tumbuh menjadi sangat besar hingga mencapai atau melebihi angka 30%, preferensi pemilih Muslim ini bertransformasi menjadi kekuatan demografis yang dominan dan menentukan; mereka secara masif memberikan suara yang solid untuk memenangkan kandidat sesama Muslim. Dominasi elektoral ini pada akhirnya mampu mengabaikan kondisi ekonomi lokal maupun resistensi dari pemilih kelas pekerja kulit putih, sekaligus memaksa pengurus partai untuk mengakomodasi preferensi mereka dalam proses seleksi kandidat.
5	Hilal Ahmed <i>New India, Hindutva Constitutionalism, and Muslim Political Attitudes</i> Metode Kualitatif	Kelompok elit Muslim, inteligensia, dan pemuda terpelajar di India menunjukkan pergeseran preferensi dengan mulai memberikan dukungan kepada AIMIM (<i>All India Majlis-e-Ittehadul-Muslimeen</i>), sebuah partai politik minoritas yang dipimpin oleh Asaduddin Owaisi. Mereka memilih mendukung AIMIM karena frustrasi terhadap partai-partai sekuler arus utamaseperti Partai Kongres (<i>Congress Party</i>) yang dinilai gagal melindungi kepentingan mereka dan hanya memanfaatkan suara Muslim secara simbolis demi keuntungan finansial atau posisi pribadi segelintir elitnya. Bagi kalangan elit Muslim ini, AIMIM menawarkan model kepemimpinan baru yang berani dan kompeten secara hukum untuk memperjuangkan hak sosio-ekonomi substantif di parlemen, tanpa harus terjebak dalam narasi ekstremisme. Meski demikian, di tingkat nasional yang lebih luas, preferensi politik pemilih Muslim (termasuk sebagian elit) masih bersifat dilematis dan sangat pragmatis; di luar wilayah basis historis AIMIM, mereka tetap terpaksa mendukung partai sekuler arus utama mana pun yang dinilai memiliki

		peluang paling besar untuk mengalahkan partai sayap kanan Hindu (BJP) di wilayah mereka.
--	--	--

Sumber : Olahan Penulis, 2026

Perbedaan penelitian pertama dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, fokus dari penelitian pertama menyangkut kedekatan yang bersifat etnis dalam hal ini preferensi legislatif atau aktor politik yang memiliki latar belakang etnis melayu yang mendukung dan bergabung ke dalam partai UMNO sebagai partai politik yang dianggap memperjuangkan semangat *ethno-nationalist* Melayu sehingga mereka para legilastif mendukung partai tersebut dikarenakan menilai UMNO sebagai repretetasi nyata bagi Etnis Melayu dalam politik di Malaysia.

Pada penelitian kedua, perbedaan dari penelitian ini ialah, menelaah identitas sebagai sarana perekrutan kandidat oleh partai politik serta pengaruh figur pimpinan dalam konteks pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Fokus penelitian tersebut terletak pada strategi partai politik dalam merekrut kandidat dan bagaimana identitas agama serta ketokohan individu digunakan sebagai modal politik untuk memperoleh dukungan masyarakat di tingkat lokal.

Penelitian ketiga mengambil perbedaan pada penelitian terkait kasta sosial yang hadir di India yang menciptakan suatu identitas sosial yang terbentuk dari stratifikasi masyarakat di India sehingga muncul gerakan partai yang menolak sistem kasta di India sehingga banyak dari legislatif di India yang berlatarbelakang sebagai kaum dalit yang dimana kaum yang memiliki strata sosial paling bawah merasa partai BSP menjadi partai yang mewakili suara mereka dalam politik dan juga demokrasi elektoral di India tentunya ini didasarkan pada kesamaan nasib identitas bahwa mereka berasal dari kaum dalit

sehingga para legislatif ataupun aktor politik yang berasal dari kasta dalit memiliki preferensi terkait kesamaan perjuangan identitas sosial mereka sebagai kaum yang termarjinal.

Persamaan dari ketiga penelitian diatas terhadap penelitian ini ialah membahas tentang latar belakang identitas tertentu individu atau elit politik dalam mendukung suatu partai politik yang dianggap memiliki latar ataupun citra partai politik yang sejalan dan sesuai dengan apa yang mereka ingin sehingga kelompok memiliki wadah dalam representasi politik secara identitas sosial ataupun sebagai tempat mereka menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah melalui partai politik yang mereka anggap mewakili kepentingan mereka.

1.7 Landasan Teoritis

1.7.1 Teori Keterwakilan

Menurut Hanna Pitkin, Keterwakilan adalah relasi antara pihak yang mewakili dan pihak yang diwakili, di mana wakil memperoleh kewenangan untuk melakukan tindakan yang sebelumnya tidak ia miliki. Sementara itu, pihak yang diwakili menanggung konsekuensi dari tindakan tersebut seakan-akan tindakan itu dilakukan olehnya sendiri. Pendekatan ini menempatkan orientasi representasi pada kepentingan pihak yang diwakili, karena hak-hak mereka diperluas sekaligus diikuti oleh tanggung jawab atas tindakan sang wakil. Menurut Hanna Pitkin ada empat jenis utama keterwakilan itu yang ada diantaranya ialah (Pitkin 1967:9);

1. Keterwakilan Formalistik. Keterwakilan formalistik merupakan penjelasan tentang bagaimana seseorang bisa menjadi wakil serta mewakilkan suatu kelompok dan pola mekanisme untuk mengatur wakil tersebut secara

institusional. keterwakilan formalistik memberikan seseorang hak untuk mewakilkan suara kita namun tetap memberikan Batasan-batasan tertentu yang berasal dari pemberi kekuasaan atau konstituen. jika seorang yang mewakilkan kita bertindak diluar ataupun tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pemberi kekuasaan maka mereka sudah keluar dari jalur ataupun batas, maka mereka harus bertanggung jawab dengan kesalahan mereka sehingga kesalahan yang mereka buat dinilai sebagai melewati batas yang ditentukan ini berlaku baik dengan tindakan baik ataupun buruk.

2. Keterwakilan Deskriptif. Keterwakilan deskriptif merujuk pada bentuk representasi yang didasarkan pada kesamaan ciri atau karakteristik tertentu antara wakil ataupun kelompok masyarakat dan masyarakat yang diwakilinya. Dalam model ini, seorang wakil atau kelompok masyarakat tidak dipahami sebagai pihak yang bertindak untuk orang lain, melainkan dianggap mewakili karena adanya kesesuaian, kedekatan, atau kemiripan baik dari identitas maupun pengalaman. Kesamaan tersebut dapat berupa persamaan nasib kolektif, gender, kelas sosial, ataupun keyakinan yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Menurut Hanna Pitkin (Pitkin 1967:90) bentuk representasi ini hanya dapat diterapkan secara terbatas atau parsial, karena jika dijalankan secara penuh dapat mengganggu bentuk representasi yang berbasis pada akuntabilitas dan otorisasi formal. Representasi deskriptif semata-mata menampilkan kemiripan identitas tanpa mempertimbangkan kompetensi, tindakan, atau kinerja wakil dalam memperjuangkan kepentingan konstituen.
3. Keterwakilan Simbolik. Keterwakilan simbolik merupakan bentuk keterwakilan yang berlandaskan pada makna yang dilekatkan pada suatu citra, figur, atau lambang yang dianggap oleh masyarakat sebagai representasi dari karakteristik tertentu dalam kelompok yang beragam. Dengan kata lain, keterwakilan ini muncul karena penerimaan masyarakat terhadap makna simbolik yang melekat pada wakil tersebut. Dalam jenis keterwakilan ini, hubungan antara wakil dan yang diwakilkan tidak ditentukan oleh tindakan nyata maupun kesamaan identitas, melainkan oleh makna simbolis yang diasosiasikan dengan wakil tersebut. Seseorang dapat dianggap mewakili kelompok tertentu karena masyarakat menilai ia merepresentasikan nilai, identitas, atau citra yang mereka pandang sebagai milik bersama.
4. Keterwakilan Substantif. Keterwakilan substantif berfokus pada kepentingan konstituen atau pihak yang memberikan mandat kepada wakil untuk menyuarakan aspirasi kelompoknya. Dalam bentuk keterwakilan ini, seorang wakil hanya dapat bertindak sesuai dengan kehendak dan kepentingan kelompok yang diwakilinya, bukan atas dasar kehendak pribadi atau kepentingan lain di luar mandat yang diterima. Wakil dituntut untuk bertanggung jawab atas setiap tindakannya, termasuk menjelaskan dan melaporkan kepada konstituen mengenai sejauh mana aspirasi mereka telah diperjuangkan serta menilai efektivitas kinerjanya. Dengan demikian, keterwakilan substantif menekankan tanggung jawab, responsivitas, dan

kesetiaan wakil terhadap kehendak masyarakat yang diwakilinya, sehingga setiap tindakan politik yang diambil tetap sejalan dengan tujuan dan kepentingan publik.

Menurut penjelasan teori keterwakilan Hanna Pitkin diatas, keterwakilan merupakan sebuah keterwakilan politik bukan sebagai kondisi statis, melainkan sebagai proses relasional yang dinamis antara wakil dan pihak yang diwakili. Representasi tidak berhenti pada mekanisme pencalonan atau kesamaan identitas, tetapi menuntut adanya relasi tanggung jawab, legitimasi, dan orientasi kepentingan. dalam persoalan PSI sebagai partai politik yang memiliki peran untuk menjadi jembatan relasi antara masyarakat dan juga calon legislatif yang akan mewakilkan suara masyarakat namun tetap pada Batasan dan juga aturan jika mengacu pada penjelasan tentang keterwakilan formalistik.

Dalam konteks calon legislatif yang beragama Kristen di dalam Partai PSI banyaknya caleg beragama Kristen memiliki efek kedekatan secara emosional dikarenakan adanya kesamaan kepercayaan antara calon legislatif dengan masyarakat pemilih terutama yang beragama Kristen, pada penjelasan keterwakilan deskriptif masyarakat akan merasa dengan memilih orang yang beragama Kristen maka ada keterwakilan bagi orang Kristen di dalam dunia politik dan juga menjadi tempat untuk mereka menyuarakan aspirasi mereka sebagai orang Kristen.

Citra ataupun figur yang melekat pada PSI sebagai partai yang bersifat plural dan menjunjung tinggi nilai toleransi menjadi sebuah simbol nilai positif dari partai tersebut dengan banyaknya calon legislatif beragama Kristen ini menjadi nilai dukungan terutama kepada mereka yang beragama Kristen, keterwakilan simbolik hadir untuk memperkuat citra partai PSI dengan nilai-nilai yang di junjung tinggi oleh partai tersebut.

Keterwakilan umat Kristen tidak hanya sebatas pada aktor yang memiliki kepercayaan yang sama ataupun partai yang menjunjung tinggi nilai toleransi, pluralisme ataupun banyaknya calon legislatif yang beragama Kristen yang masuk ke dalam Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk mengusung kandidat-kandidat beragama Kristen tidak hanya dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan keterwakilan deskriptif kelompok minoritas agama, tetapi juga sebagai strategi politik yang berpotensi membangun keterwakilan substantif. keputusan PSI dalam memilih dan mengusung kandidat Kristen didasarkan pada pertimbangan kemampuan kandidat dalam memperjuangkan kepentingan publik khususnya kepentingan kelompok minoritas.

1.7.2 Teori Identitas Sosial

Teori identitas sosial yang dikembangkan oleh Henri Tajfel dan John C. Turner menjelaskan bahwa setiap individu cenderung membangun dan mempertahankan identitas sosial yang positif, karena identitas sosial menjadi bagian dari konsep diri individu. Untuk mencapai hal ini, individu terlebih dahulu mengkategorikan diri ke dalam suatu kelompok sosial tertentu. Menurut Tajfel dan Turner, sebelum seseorang benar-benar diterima dalam kelompok, individu harus menginternalisasi nilai-nilai kelompok ke dalam dirinya agar dapat berpartisipasi secara utuh dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, individu melakukan perbandingan sosial dengan kelompok lain untuk menegaskan posisi positif kelompoknya sendiri. Proses ini memungkinkan terciptanya perbedaan cara pandang yang positif terhadap kelompok sendiri, meskipun tidak semua pertimbangan bersifat evaluatif atau positif. Menurut Tajfel dan Turner ada tiga Langkah

proses pembentukan identitas sosial seseorang maupun kelompok yaitu (Turner 1979:40-41);

1. Kategorisasi sosial merupakan proses ketika individu menyederhanakan keragaman sosial yang kompleks ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kesamaan perasaan, tujuan, serta identitas. Melalui kategorisasi ini, seseorang mulai menempatkan dirinya dalam kelompok sosial tertentu misalnya berdasarkan agama, kelas sosial, keanggotaan kelompok sosial dan ideologi kemudian mencari kelompok yang dianggap merepresentasikan dirinya. Proses dari kategorisasi sosial sendiri akan mempengaruhi individu untuk melakukan pembedaan yang signifikan terhadap kelompoknya sendiri (*in-group*) terhadap kelompok lain (*out-group*) sehingga menciptakan kecenderungan penekanan besar hanya sesama kelompoknya sendiri. Namun, kategori sosial juga memberikan pengaruh evaluatif kepada individu untuk menciptakan narasi yang membangun citra positif terhadap kelompoknya sendiri agar menjadi lebih baik dari kelompok lain.
2. Identifikasi sosial merupakan proses ketika individu menempatkan dirinya sebagai bagian dari suatu kelompok dalam masyarakat dan membangun keterikatan emosional di dalamnya. Melalui proses ini, individu tidak hanya bergabung secara administratif, melainkan menyerap dan menginternalisasi nilai-nilai kelompok menjadi bagian dari identitas pribadinya. Proses internalisasi kognitif ini bersifat relasional dan komparatif, di mana individu memetakan posisi dirinya terhadap kelompok lain, sekaligus memunculkan dorongan evaluatif untuk memperkuat dan mempromosikan nilai kelompoknya sendiri agar dipandang lebih unggul atau bernilai positif. Keanggotaan ini pada akhirnya menumbuhkan rasa kepemilikan yang mendalam, di mana individu merasa bahwa tindakan dan eksistensi dirinya merupakan representasi nyata dari kelompok tersebut.
3. Perbandingan sosial merupakan proses ketika individu mengevaluasi keselarasan antara arah kelompok dengan harapan serta kepentingan pribadinya. Melalui mekanisme ini, anggota menilai konsistensi kelompok dalam mewujudkan cita-cita bersama guna memberikan dampak positif bagi masyarakat. Apabila evaluasi ini menghasilkan penilaian negatif, ketidakpuasan yang muncul dapat mendorong individu mengurangi partisipasi atau berpindah ke kelompok lain yang dianggap lebih mampu menjaga nilai positif identitas sosial mereka. Sebaliknya, jika didasari keterikatan emosional, perbandingan ini menjadi motivasi kolektif untuk memperkuat kelompok sendiri agar menjadi entitas yang unggul. Pada akhirnya, perbandingan sosial berfungsi sebagai jembatan penting yang menghubungkan identifikasi kelompok dengan perilaku kolektif, didorong oleh kebutuhan mendasar individu untuk memperoleh kebanggaan melalui citra positif kelompoknya.

Dalam Penjelasan teori identitas sosial ada beberapa tahapan yang dijalankan untuk menjadi seseorang ataupun kelompok untuk membentuk identitas mereka, dalam konteks PSI dengan banyaknya calon legislatif beragama Kristen sehingga ini memperkuat narasi bahwa Partai PSI merupakan partai yang relatif inklusif dan memberikan ruang yang banyak bagi kaum minoritas serta memperkuat kategorisasi bahwa PSI salah satu *In-group* politik, yang maksud ialah PSI sebagai partai yang tidak berhaluan ajaran Kristen tetapi memperjuangkan para kaum minoritas sehingga partai PSI dianggap bagian dari perjuangan para kaum minoritas untuk menyampaikan aspirasi mereka di dalam dunia politik melalui Partai PSI sehingga kategorisasi sosial yang menonjol di mana caleg Kristen yang ada di dalam PSI adalah wakil kategori sosial umat Kristen di DKI Jakarta.

Identifikasi sosial sebagai proses menginternalisasi suatu individual atau kelompok masyarakat ke sebuah organisasi ataupun himpunan, dalam hubungannya dengan Partai PSI banyaknya caleg beragama Kristen akan menarik simpatis secara emosional individu ataupun kelompok masyarakat Kristen untuk bergabung ke dalam partai tersebut dikarenakan adanya rasa keterwakilan sesama Kristen.

Proses yang terakhir merupakan perbandingan sosial yang muncul untuk melihat diri mereka (*In-group*) dibandingkan oleh (*out-group*) yang diluar mereka sehingga akan menilai kelompok didalam mereka apakah bertindak dengan baik dan sejalan atau mundur dan tidak arah, dalam konteks PSI seorang caleg Kristen akan melihat partai PSI apakah masih sejalan dengan prinsip partai yang memperjuangkan toleransi dan pluralisme, Caleg atau kader Kristen yang sudah berada di dalam partai harus menyesuaikan aspirasi kelompok agamanya dengan agenda kolektif partai, sehingga

keterwakilan yang dihasilkan sering kali bersifat termediasi oleh struktur partai sehingga terlihat peran partai itu sendiri secara nyata aktif dan terlibat dalam mendukung aspirasi kaum Kristen merupakan nilai positif yang akan diterima oleh seluruh anggota partai yang mempengaruhi loyalitas terhadap partai tersebut.

Relevansi teori identitas sosial dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya menjelaskan bagaimana identitas keagamaan, dalam hal ini sebagai orang Kristiani, dapat memengaruhi keputusan calon legislatif untuk terlibat dalam politik melalui Partai Solidaritas Indonesia (PSI) serta membentuk interaksi mereka di dalam partai dan masyarakat. Teori identitas sosial menjelaskan bahwa individu cenderung mengidentifikasi diri dengan kelompok yang memiliki nilai, visi, dan tujuan yang dianggap sejalan dengan identitas pribadinya. Dalam konteks penelitian mengenai keterwakilan politik kandidat Kristiani pada Pemilu Legislatif 2024 di DKI Jakarta melalui PSI, teori ini membantu memahami bahwa keputusan para calon legislatif untuk bergabung dan maju melalui PSI tidak semata-mata didasarkan pada faktor agama, tetapi juga dipengaruhi oleh kesesuaian nilai-nilai partai, seperti pluralisme, toleransi, dan inklusivitas, dengan identitas serta keyakinan yang mereka miliki.

1.7.3 Partai Politik

Menurut Sigmund Neumann memandang partai politik sebagai unsur sentral dalam sistem politik demokratis modern. Dalam perspektif Neumann, partai politik tidak sekadar dipahami sebagai kendaraan elektoral untuk meraih kekuasaan, melainkan sebagai organisasi politik yang terlembaga dan berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan negara. Partai politik berperan mengorganisasikan kepentingan sosial dan

ide-ide politik yang berkembang di masyarakat agar dapat disalurkan secara efektif ke dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat pemerintahan keberadaan partai politik tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat partai tersebut tumbuh. Partai lahir dari kepentingan sosial, konflik, serta orientasi ideologis tertentu yang kemudian dilembagakan melalui organisasi politik. Oleh karena itu, partai politik mencerminkan struktur sosial masyarakat dan menjadi wadah bagi kelompok-kelompok sosial untuk memperjuangkan aspirasi mereka secara kolektif. Dalam hal ini, partai tidak hanya berfungsi sebagai alat representasi, tetapi juga sebagai sarana integrasi sosial yang menghubungkan warga negara dengan negara (Neumann 1956: 352)

Menurut Sigmund Neumann, partai politik memiliki kewajiban yang lebih luas daripada sekadar memenangkan pemilu atau menduduki jabatan pemerintahan. Neumann menekankan bahwa partai politik berfungsi sebagai institusi yang menghubungkan masyarakat dengan negara, sehingga tugas dari partai politik ialah (Neumann 1956: 352-354)

1. Artikulasi kepentingan berarti partai bertindak sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk mengekspresikan beragam aspirasi, kebutuhan, dan tuntutan yang tersebar di ranah ekonomi, sosial, budaya, maupun ideologis. Melalui mekanisme internal dan eksternal seperti forum diskusi, musyawarah kader, dan konsultasi komunitas partai menghimpun prioritas sosial tersebut. Selanjutnya, partai melakukan agregasi kepentingan dengan mengombinasikan dan menyusun berbagai aspirasi yang kompleks menjadi satu paket agenda politik yang koheren serta realistis untuk diperjuangkan di tingkat pemerintahan. Partai politik yang gagal menjalankan kedua fungsi ini berisiko kehilangan legitimasi dan fungsi representatifnya karena ketidakmampuan menjembatani suara konstituen dengan proses pengambilan kebijakan publik. Oleh karena itu, efektivitas artikulasi dan agregasi kepentingan menjadi indikator krusial dalam menilai sejauh mana partai politik mampu merepresentasikan rakyat secara nyata dalam sistem demokrasi.

2. Partai politik tidak sekadar berfungsi sebagai jaringan informal atau kelompok temporer, melainkan diwajibkan memiliki struktur organisasi yang permanen dan terartikulasi dari tingkat pusat hingga akar rumput. Struktur ini mencakup kepengurusan formal, aturan internal yang jelas, serta mekanisme pengambilan keputusan yang terdokumentasi secara konsisten. Keberadaan organisasi yang stabil inilah yang memungkinkan partai menjalankan fungsi politiknya secara sistematis, mulai dari penyusunan program kerja, pelaksanaan kebijakan, hingga proses kaderisasi anggota. Struktur yang kuat menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan ideologi dan nilai partai karena mengikat setiap pengurus untuk mematuhi pedoman internal. Pada akhirnya, stabilitas organisasi ini tidak hanya mendorong efisiensi internal, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik karena masyarakat melihat partai memiliki mekanisme yang kredibel dalam merepresentasikan kepentingan politik secara terstruktur.
3. Mendidik dan Mengarahkan Partisipasi, Politik Partai juga memiliki kewajiban untuk mendidik masyarakat agar memahami isu politik, hak-hak politik, dan mekanisme partisipasi. Hal ini dilakukan melalui kaderisasi, sosialisasi program, dan komunikasi politik yang terarah. Fungsi ini memungkinkan partai tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga menjadi sarana pengembangan kesadaran politik masyarakat, sehingga demokrasi dapat berjalan secara efektif. Fungsi ini menekankan peran partai sebagai sarana peningkatan kesadaran politik publik, bukan sekadar alat perebutan kekuasaan. Partai melakukan tugas ini melalui berbagai mekanisme, seperti kaderisasi internal bagi anggota dan pengurus, sosialisasi program atau kebijakan kepada masyarakat, serta komunikasi politik yang terstruktur dan terarah. Melalui kaderisasi, anggota partai tidak hanya memahami nilai dan ideologi partai, tetapi juga dilatih untuk menjadi penggerak politik di tingkat masyarakat. Sementara itu, sosialisasi program dan komunikasi publik membantu masyarakat luas untuk memahami isu politik, hak-hak mereka, serta cara berpartisipasi dalam proses politik secara efektif. Dengan demikian, partai politik tidak hanya merepresentasikan kepentingan sosial, tetapi juga mengembangkan kapasitas politik masyarakat, memperkuat partisipasi publik, dan mendukung berjalannya demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.
4. Partai politik diwajibkan menjadi representasi nyata dari seperangkat nilai dan prinsip ideologis tertentu yang membentuk identitasnya. Nilai-nilai ini tidak sekadar menjadi simbol formal, melainkan harus diinternalisasikan sebagai pedoman perilaku bagi pengurus, kader, dan anggota dalam setiap tindakan politik, baik di ranah internal maupun dalam interaksi dengan masyarakat luas. Melalui konsistensi ideologis, partai memastikan bahwa orientasi politiknya tidak bersifat transaksional atau oportunistik, melainkan berlandaskan pada tujuan sosial-politik jangka panjang yang jelas. Komitmen terhadap nilai-nilai ini pada gilirannya akan memperkuat legitimasi publik dan menjaga kohesi internal partai. Dengan demikian, partai yang konsisten

menjaga ideologinya akan mampu membangun identitas politik yang kuat serta memosisikan diri sebagai agen perubahan sosial yang kredibel dalam sistem demokrasi.

5. Partai politik yang berhasil memenangkan pemilihan umum atau menempatkan kadernya di struktur pemerintahan memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menjalankan kekuasaan sesuai mandat publik. Neumann menekankan bahwa legitimasi sebuah partai politik sangat bergantung pada kemampuannya dalam merepresentasikan kepentingan rakyat secara nyata serta konsistensinya dalam mematuhi prinsip-prinsip demokrasi. Partai tidak boleh mengabaikan kepentingan kolektif demi mengutamakan kepentingan individu atau kelompok elite internalnya. Kegagalan dalam memenuhi tanggung jawab ini akan mengikis kepercayaan publik dan merusak kredibilitas partai sebagai institusi demokratis. Oleh karena itu, kekuasaan yang diperoleh harus selalu diorientasikan pada kesejahteraan umum dengan menjadikan akuntabilitas serta transparansi sebagai bagian integral dari praktik politik, sehingga peran partai sebagai jembatan antara rakyat dan negara dapat berjalan secara efektif serta berkelanjutan.

Partai politik merupakan elemen penting dalam sistem politik di Indonesia, berperan sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, memilih pemimpin, serta menggerakkan partisipasi massa. Sebagai lembaga yang diakui secara resmi oleh pemerintah, partai politik diatur melalui regulasi khusus. Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang mengatur pembentukan partai, fungsi-fungsi yang dijalankan, serta struktur organisasi internalnya. Isi dari aturan tersebut meliputi (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik):

1. Pengertian Dari Partai Politik menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan bahwa Pasal 1 ayat (1)

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, partai politik adalah organisasi politik berskala nasional yang dibentuk secara sukarela oleh warga negara Indonesia dengan tujuan utama mencalonkan anggota legislatif, ikut serta dalam pemerintahan, serta menyalurkan aspirasi rakyat. Definisi ini menekankan bahwa partai politik lebih dari sekadar kelompok sosial; ia merupakan organisasi yang memiliki struktur kepengurusan jelas, mulai dari tingkat pusat hingga kecamatan, sehingga dapat melaksanakan fungsi politiknya secara efektif. Selain itu, partai harus memiliki cakupan nasional agar kepentingannya dapat dirasakan di seluruh Indonesia. Pembentukan partai secara sukarela menegaskan prinsip demokrasi internal, di mana anggota bergabung karena kesamaan visi, misi, dan ideologi. PSI dalam menempatkan calon legislatif beragama Kristen di berbagai daerah pemilihan terutama di DKI Jakarta. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip UU yang menekankan partai sebagai sarana penyaluran aspirasi rakyat, termasuk kelompok minoritas, serta sebagai wadah untuk memperkuat demokrasi internal melalui partisipasi sukarela. Dengan struktur organisasi yang jelas dan jangkauan nasional, PSI mampu mengelola aspirasi politik komunitas Kristen secara sistematis, sehingga keberadaan mereka di parlemen potensial dapat memengaruhi kebijakan publik yang inklusif dan representatif.

2. Tujuan dibentuknya Partai Politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menjelaskan bahwa;

Pasal 10 ayat (1) Tujuan umum Partai Politik adalah:

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 10 ayat (2)

Tujuan khusus Partai Politik adalah:

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam pembentukan partai politik setiap partai harus mengutamakan cita-cita nasional bangsa Indonesia agar bisa terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga partai politik memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih beradab dan bermartabat melalui jalur politik yang mengutamakan kepentingan masyarakat sesuai dengan Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Partai Politik diharapkan menjadi wadah yang sah untuk menciptakan kondisi musyawarah dan demokrasi yang baik di dalam masyarakat yang menjadi mekanisme dari sistem pemerintahan kita yang mengutamakan mufakat sebagai jalan untuk mengambil keputusan sehingga partai politik bisa bergerak sesuai dengan kehendak masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. untuk menghasilkan dan menjalankan tersebut partai politik tidak hanya berhenti menjadi wadah namun juga

menjadi agen pergerakan dengan mengajak seluruh masyarakat itu ambil bagian dalam berpolitik.

Meningkatkan kesadaran dalam berpolitik menjadi tujuan yang baik dari partai politik untuk memajukan bangsa kita, dengan adanya kesadaran berpolitik maka diharapkan melalui partai politik masyarakat juga dapat meningkatkan partisipasi politik mereka untuk kepentingan kelompok dan juga nasional yang memberikan hasil sebuah budaya politik yang demokratis dan mufakat. Budaya politik akan melekat pada suatu bangsa dengan adanya budaya politik bangsa akan menjadi kuat dan dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi suatu bangsa sehingga tercipta masyarakat yang simpatis terhadap politik membuat kekuatan masyarakat sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang sah dan demokratis.

Dalam konteks Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memanfaatkan tujuan partai tersebut untuk meningkatkan keterwakilan politik komunitas Kristen di DKI Jakarta dengan menempatkan calon legislatif Kristen di beberapa daerah pemilihan. Selain itu, melalui pendidikan politik dan kaderisasi, PSI tidak hanya menyiapkan calon legislatif yang kompeten, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat Kristen. Dengan demikian, penerapan tujuan partai politik sebagaimana diatur dalam UU No. 2/2008 memberikan dasar normatif bagi strategi PSI untuk memastikan aspirasi kelompok Kristen tersalurkan secara formal dan substantif, sekaligus menegaskan prinsip demokrasi inklusif dalam praktik politik di DKI Jakarta.

3. Fungsi Partai Politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menjelaskan bahwa ;

Pasal 11 ayat (1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Partai Politik menjadi tempat untuk menyalurkan pendidikan politik bagi masyarakat sehingga timbul rasa bertanggung jawab sebagai warga negara untuk ikut ambil bagian berpolitik bagi bangsa, politik tidak hanya sebatas pada sebuah kekuasaan namun juga menentukan prinsip ataupun cara pandang kita dalam melihat bangsa kita agar tercipta dan tertanam nilai nasionalisme dalam diri kita maka diperlukan pendidikan politik salah satunya melalui partai politik yang hadir sebagai agen pemerintah dan ruang bagi masyarakat untuk aktif, dalam praktiknya tidak semua anggota yang masuk ke dalam partai politik itu hadir dan langsung berfokus kepada kekuasaan mereka harus menjalankan beberapa pembelajaran seperti penanaman prinsip partai politik ataupun ideologi dari partai politik yang tentunya harus sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara kita.

Dengan terbentuknya kesadaran berbangsa dan bernegara dalam pendidikan politik maka akan menciptakan tatanan sosial yang kondusif dan mengutamakan nilai persatuan serta saling menghormati satu sama lain ini memberikan partai politik ruang untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat sesuai dengan tuntutan dan keperluan mereka dalam menghadapi masalah ataupun penyelesaian konflik disini merupakan fungsi dari partai politik itu sendiri agar dampaknya tidak mempengaruhi perdamaian dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan tertatanya kondisi di masyarakat dan juga adanya alur penyelesaian masalah yang dapat difasilitasi oleh partai politik, maka tugas partai politik juga mengajak dengan membuka rekrutmen dan kaderisasi dari partai politik tentunya proses ini didasarkan pada partai politik tersebut membuat citra sebagai partai politik yang mengaungkan suatu nilai sehingga masyarakat tertarik untuk bergabung ke partai tersebut dikarenakan adanya kesesuaian dalam diri mereka terhadap partai tertentu, dalam proses ini tentunya partai politik juga harus memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender dengan kaum perempuan sehingga suara mereka juga dapat didengar sebagai tanda dari kesetaraan sosial antara laki-laki dan perempuan.

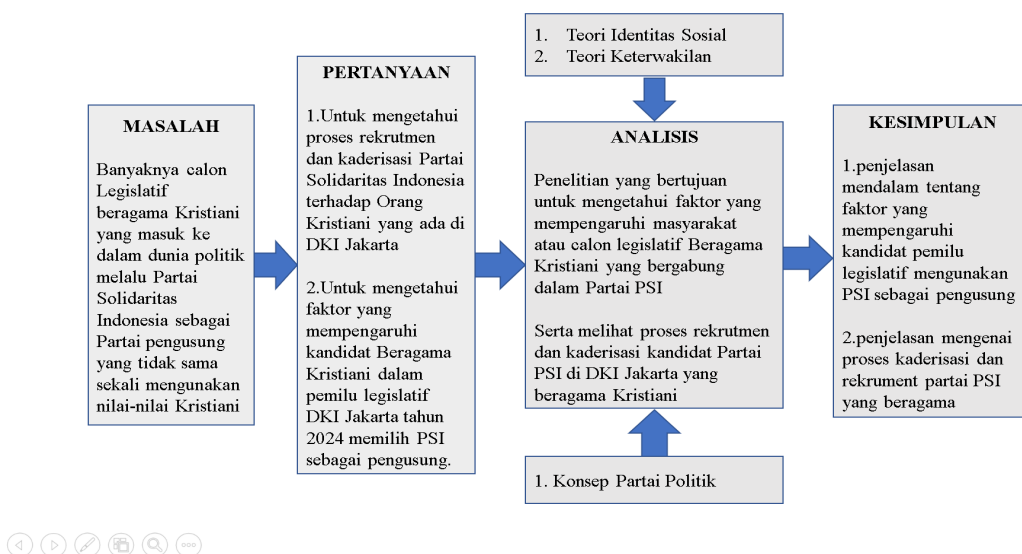
Dalam konteks Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggunakan fungsi penyaluran aspirasi rakyat dengan menempatkan calon legislatif Kristen di berbagai daerah pemilihan di DKI Jakarta, sehingga kepentingan politik komunitas ini dapat masuk ke arena legislatif. Lebih lanjut, melalui pendidikan politik dan kaderisasi, PSI memperkuat kapasitas politik calon dan anggota komunitas Kristen, sehingga keterwakilan mereka bersifat substantif, bukan sekadar simbolis. Fungsi pengawasan kebijakan juga

memungkinkan PSI untuk memastikan aspirasi Kristen diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat provinsi. Dengan demikian, penerapan fungsi partai politik oleh PSI mencerminkan implementasi prinsip demokrasi inklusif dan memberikan legitimasi normatif bagi representasi kelompok minoritas, selaras dengan tujuan pembentukan partai politik menurut UU No. 2/2008.

1.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur garis besar yang dirancang oleh peneliti untuk menyusun proses penelitian, kerangka pemikiran memiliki manfaat untuk menjelaskan alur berpikir dari sebuah penelitian.

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



Penjelasan dari bagan diatas yaitu masalah ataupun pernyataan berangkat dari banyaknya calon legislatif yang beragama Kristen maju ke pileg 2024 melalui Partai Solidaritas Indonesia yang notabene bukan merupakan partai politik secara terbuka menggunakan

nilai-nilai Kristen, melainkan sebuah partai yang bersifat terbuka dan berfokus kepada anak muda, maka munculnya sebuah pertanyaan penelitian yang digunakan untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi orang Beragama Kristen masuk ke dalam PSI dan terjun ke dalam dunia politik serta bagaimana rekrutmen dan kaderisasi partai politik dalam menerima orang Kristen yang ingin terlibat dalam politik langsung.

Penggunaan teori Identitas sebagai landasan teori untuk mencari jawaban tentang bagaimana sifat dari orang Kristen yang bergabung ke dalam PSI sehingga terjadi kategorisasi diri mereka di partai tersebut dan merasa bahwa PSI mewakili suara minoritas dalam politik di DKI Jakarta. Dengan dilakukan penelitian ini maka akan menghasilkan pengertian yang mendalam dan jawaban faktor yang mempengaruhi orang Kristen di DKI Jakarta yang maju ke pemilihan legislatif tahun 2024 yang menggunakan Partai PSI sebagai kendaraan politiknya dan juga melihat bagaimana rekrutmen dan kaderisasi partai tersebut terutama terhadap orang Kristen.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif, menurut Sugiyono, pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci. Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan dengan berbagai teknik seperti wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh bersifat deskriptif dan dianalisis secara induktif, yaitu berpijak dari data lapangan menuju teori atau konsep. dengan

penjelasan demikian maka data yang diambil dalam penelitian ini memberikan penjelasan sebab ataupun faktor dari permasalahan yang menjadi tujuan penelitian.

1.9.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian eksploratif merupakan bentuk penelitian yang bertujuan menemukan dan menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena yang muncul di masyarakat. Menurut Sugiyono, penelitian eksploratif digunakan rumusan masalah belum terbentuk dengan jelas, sehingga peneliti perlu melakukan upaya pencarian, penggalian, penemuan, serta identifikasi terhadap fenomena tersebut agar dapat dirumuskan menjadi bahan perkembangan penelitian berikutnya. Penelitian ini memberikan pemahaman awal mengenai gejala atau isu yang masih baru maupun yang belum banyak dikaji, sehingga memungkinkan peneliti mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kemunculan fenomena dan pihak-pihak yang berperan di dalamnya (Sugiyono, 2016: 5–6).

Penggunaan penelitian eksploratif memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan dalam penelitian tentang faktor yang menyebabkan banyaknya orang beragama Kristen masuk ke dalam Partai Solidaritas Indonesia dan juga melihat bagaimana Partai Solidaritas Indonesia membentuk persepsi nilai di dalam partainya sehingga banyak orang Kristen berminat masuk ke dalam partai tersebut.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Data memiliki peran yang sangat krusial dan menjadi unsur utama dalam setiap kegiatan penelitian ilmiah. Tanpa adanya data, suatu penelitian tidak akan memiliki landasan empiris yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Melalui data, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang objektif terhadap berbagai gejala sosial, ekonomi, politik, maupun budaya, sehingga hasil penelitian yang dihasilkan bukan sekadar pendapat subjektif, melainkan berlandaskan pada fakta yang dapat diuji kebenarannya.

Data dalam penelitian merupakan sebuah hasil dari penelitian yang didapatkan dari narasumber dan dokumen yang memiliki kaitan dengan objek penelitian, Data penelitian adalah potongan-potongan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis (Creswell, 2018:173-175). menurut Creswell data Penelitian terbagi menjadi dua jenis yaitu ;

1. Data Primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek atau sumber pertama (responden/partisipan) untuk keperluan penelitian tertentu. Dengan kata lain, data primer adalah informasi orisinal yang diperoleh melalui interaksi langsung peneliti dengan sumber data misalnya lewat wawancara, observasi, kuesioner/survei, eksperimen, atau teknik pengumpulan data lainnya yang dilakukan sendiri oleh peneliti (Nazir, 2014:51-52). menurut Nazir ada beberapa ciri sebuah data dikatakan sebagai data primer yaitu;
 - a. Data dapatkan langsung dari subjek penelitian dan belum diolah oleh pihak lain
 - b. Dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian tertentu

- c. Peneliti mengontrol cara wawancara, instrumen, dan prosedur pengumpulan sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan penelitian

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini. Data primer dimaksud merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama selaku subjek penelitian. Adapun dalam pelaksanaannya wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data dari suatu sumber dengan cara berbicara langsung kepada narasumber. Menurut Moleong, wawancara adalah suatu bentuk percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu, di mana dua pihak terlibat secara langsung, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban. Dalam konteks penelitian kualitatif, wawancara merupakan salah satu teknik utama untuk menggali informasi yang bersifat mendalam dan kontekstual. Moleong membedakan wawancara ke dalam dua jenis, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun secara sistematis, dan biasanya digunakan untuk memperoleh data yang seragam dari berbagai responden. Sementara itu, wawancara tidak terstruktur bersifat lebih fleksibel, di mana pewawancara dapat mengembangkan pertanyaan secara spontan sesuai dengan alur percakapan, sehingga memungkinkan eksplorasi makna subjektif dan pandangan mendalam dari narasumber (Moleong, 2007:186-187). Dalam Penelitian ini, adapun Langkah ataupun tahapan yang dilakukan untuk

mendapat data primer penelitian yaitu dengan melakukan secara terstruktur dengan memperhatikan beberapa teori yang di gunakan ;

- a. Peneliti melakukan wawancara kepada calon legislatif yang beragama Kristen tahun 2024 di daerah pemilihan DKI Jakarta untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung mereka menggunakan partai politik PSI sebagai kendaraan politik mereka.
- b. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak PSI terkait perekrutan dan kaderisasi anggota partai PSI pada tahun 2024 dengan pengurus DPW PSI Jakarta dengan meminta data dan juga calon legislatif tahun 2024 kepada pihak PPID PSI DKI Jakarta bidang penyediaan data dan informasi.

Tabel 1.5 Tabel Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	Geraldi Ryan Wibinata	Sekretaris DPW PSI Jakarta
2.	Allya Natasya Aurora	Ketua OKK PSI Jakarta
3.	Bun Joi Phiau	Calon Legislatif Dapil 3
4.	Josephine Simanjuntak	Calon Legislatif Dapil 4
5.	Aditya Linardo Putra	Calon Legislatif Dapil 2
6.	Hervin Afriansi	Calon Legislatif Dapil 1
7.	Mieke Pesiwarissa	Calon Legislatif Dapil 9
8.	Jordy Sonia Nussy	Calon Legislatif Dapil 5
9.	Kahfi Adlan Hafidz	Perludem DKI Jakarta

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2026

Penentuan sembilan narasumber ini dirancang secara komprehensif menggunakan metode campuran antara aktor internal partai dan pihak eksternal independen guna mendapatkan gambaran yang utuh dan objektif mengenai dinamika elektoral parpol di Jakarta. Dari ceruk internal,

pengambilan pimpinan wilayah seperti Sekretaris DPW PSI Jakarta, Gerald Ryan Wibinata, dan Ketua OKK, Allya Natasya Aurora, berfungsi untuk membongkar dapur strategi, kebijakan taktis, serta peta kekuatan kaderisasi parpol di tingkat provinsi. Informasi regulasi dan kebijakan tersebut kemudian dikonfrontasi dengan realitas lapangan melalui wawancara bersama enam calon legislatif dari berbagai daerah pemilihan yang berbeda, mulai dari Dapil 1 hingga Dapil 9. Kehadiran para caleg ini sangat krusial untuk menangkap variasi tantangan sosiologis di akar rumput, mengingat karakteristik dan preferensi pemilih di setiap wilayah Jakarta memiliki keunikan tersendiri yang tidak bisa disamaratakan.

2. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumber utama, melainkan melalui sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, arsip, laporan resmi, buku, jurnal, maupun publikasi lembaga. Data sekunder pada dasarnya merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan pihak lain yang kemudian dimanfaatkan oleh peneliti untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan (Nazir, 2014:52-53). Nazir menjelaskan ciri dari sebuah data sekunder diantara;
 - a. Peneliti tidak mengumpulkan data tersebut sendiri, melainkan menggunakan hasil pengumpulan pihak lain
 - b. Umumnya berupa arsip, catatan, laporan, atau hasil publikasi resmi
 - c. Data ini biasanya telah dianalisis, disusun, atau dipublikasikan dalam bentuk tertentu seperti buku, jurnal atau artikel ilmiah

- d. Membantu peneliti memahami konteks penelitian secara lebih luas dan mendalam.

Dokumentasi atau Studi Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang berdasarkan hasil dari sumber-sumber dokumen yang terpercaya yang berguna sebagai sumber utama ataupun sumber pendukung berupa dokumen, hasil keputusan, catatan, arsip dan sebagai yang dinilai sebagai sumber tertulis, menurut Nazir studi instrument atau metode dokumentasi merupakan salah satu cara dalam pengumpulan data dengan menelaah serta menganalisis berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa catatan, laporan, arsip, atau bentuk tulisan lain yang berasal dari instansi pemerintah, organisasi, maupun individu. Teknik ini berfungsi untuk memperoleh data sekunder, yakni data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain dan bukan hasil pengamatan langsung peneliti di lapangan. Melalui studi dokumen, peneliti dapat menggali informasi yang bersifat historis dan deskriptif guna melengkapi serta memperkuat temuan dari data primer (Nazir, 2014:79-80).

Dalam Penelitian ini, data sekunder digunakan untuk mendukung data primer penelitian maka adapun beberapa dokumen ataupun data pendukung penelitian dan Langkah yang digunakan untuk mendapatkan data tersebut yaitu ;

- a. Sejarah terbentuknya Partai Solidaritas Indonesia didapatkan dari beberapa website elektronik dan website resmi Partai PSI

- b. struktur pengurus DPW PSI DKI Jakarta didapatkan dari surat keputusan DPP PSI Nomor 612/SK/DPP/2024
- c. tugas dan wewenang DPW PSI DKI Jakarta Berdasarkan Pasal 25 AD/ART Partai PSI tahun 2014
- d. Demografi DKI Jakarta berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023
- e. Jumlah calon legislatif yang beragama Kristen (Katolik dan Protestan) di DKI Jakarta tahun 2024 berdasarkan portal umum Pemilu tahun 2024.

1.9.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan indikator dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban dan pertanyaan yang tepat agar menjawab rumusan masalah yang akan di teliti sehingga Instrumen berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa proses pengumpulan data berjalan sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian sehingga data tersebut dapat dianalisis dan menghasilkan kesimpulan penelitian (Sugiyono, 2016: 102–104).

Berdasarkan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini maka peneliti menyusun indikator dan instrument penelitian sebagai berikut;

Tabel 1.6 Tabel Operasional Teoritis

Teori	Dimensi	Indikator	Pertanyaan
Teori Keterwakilan (Hanna Pitkin)	Formalistik	Proses pencalonan calon legislatif	1. Dapatkah Anda menjelaskan proses formal yang Anda lalui hingga ditetapkan sebagai calon legislatif? 2. Aturan atau ketentuan apa yang menurut anda memberikan legitimasi terhadap pencalonan Anda?

			3. Sejauh mana Anda memahami dasar hukum atau mekanisme resmi yang mengatur posisi Anda sebagai calon legislatif?
		Pemberian mandat untuk mewakili suara rakyat	4. Menurut Anda, apa makna mandat yang diberikan pemilih kepada seorang calon legislatif? 5. Apakah Anda memandang mandat tersebut sebagai pelimpahan kekuasaan dari pemilih kepada wakil? Mengapa? 6. Bagaimana Anda memahami posisi Anda sebagai wakil dalam membawa suara pemilih ke ranah politik?
	Deskriptif	Kesamaan Identitas	7. Apakah Latar belakang Kristiani mempengaruhi proses pencalonan dalam Partai PSI? 8. Sebagai caleg yang beragama Kristiani apakah anda merasa kesamaan latar belakang agama mempengaruhi kedekatan identitas anda dengan partai PSI? 9. Apakah Anda merasa memiliki kesamaan identitas dengan kelompok masyarakat yang Anda wakili? 10. Identitas atau karakteristik apa yang menurut Anda paling mendekatkan Anda dengan konstituen?
		Representasi Berbasis Identitas	11. Apakah kesamaan identitas cukup untuk menjadikan seseorang sebagai wakil kelompok tertentu? Mengapa? 12. Sejauh mana kesamaan identitas tersebut memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap Anda sebagai calon legislatif?
		Representasi Nyata	13. Apa Pandangan anda sebagai bagian dari PSI terkait banyaknya calon legislatif yang beragama Kristiani di dalam Partai Solidaritas Indonesia? 14. Apakah keterlibatan kader Kristiani bersifat substantif atau hanya formalitas organisasi? 15. Menurut Anda, seberapa penting kesamaan identitas antara wakil dan masyarakat yang diwakilinya?
	Simbolik	Makna simbolik PSI bagi kelompok minoritas (terutama Protestan dan Katolik)	16. Bagi Anda pribadi, apa makna PSI dalam konteks pluralisme dan toleransi? 17. Bagaimana PSI menampilkan identitas pluralisme dalam simbol dan narasi politiknya? 18. Apakah PSI bisa menjadi simbol keterbukaan bagi kaum minoritas untuk aktif dalam politik?

		Representasi Nilai dan Citra	19. Nilai atau identitas apa yang menurut Anda direpresentasikan oleh diri Anda di mata konstituen? 20. Apakah nilai atau citra tersebut sesuai dengan harapan kelompok masyarakat tertentu? 21. Bagaimana Anda menjaga konsistensi citra atau nilai tersebut dalam aktivitas politik Anda?
		Penerimaan Masyarakat terhadap wakil	22. Menurut Anda, sejauh mana masyarakat menerima Anda sebagai representasi simbolik dari kelompok Kristen? 23. Apakah penerimaan tersebut lebih didasarkan pada citra atau makna simbolis dibandingkan tindakan nyata Anda? 24. Bagaimana Anda melihat respons masyarakat terhadap simbol atau citra yang melekat pada diri Anda?
	Substantif	Perjuangan kepentingan konstituen	25. Menurut Anda, sejauh mana kepentingan konstituen menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan politik Anda? 26. Apakah anda melihat PSI memfasilitasi perjuangan isu-isu Kristiani yang dihadapi oleh mereka?
		Tanggung Jawab dan Akuntabilitas	27. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang Anda lakukan atau rencanakan kepada konstituen? 28. Apakah Anda merasa perlu menjelaskan setiap tindakan politik yang Anda ambil kepada masyarakat? Mengapa? 29. Mekanisme apa yang menurut Anda paling tepat untuk menilai tanggung jawab wakil rakyat?
		Keselarsan Tindakan dengan Kepentingan Publik	30. Bagaimana Anda memastikan bahwa setiap tindakan politik Anda tetap berpihak pada kepentingan publik? terutama bagi kelompok Kristen? 31. Apakah menurut Anda semua keputusan politik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituen? 32. Bagaimana Anda menyikapi kritik masyarakat terhadap kinerja atau kebijakan yang Anda dukung?
Teori Identitas Sosial (Tafjel & Turner)	Kategori Sosial	Kesesuaian nilai terhadap kelompok dan pribadi	33. Faktor ataupun alasan memilih PSI sebagai kendaraan politik ? 34. Nilai apa dalam PSI yang sesuai dengan latar belakang anda yang beragama Kristiani?
		Kesamaan Tujuan Politik	35. Tujuan politik apa dari PSI yang menurut Anda paling sesuai dengan tujuan politik pribadi Anda?

			36. Se jauh mana tujuan tersebut memengaruhi pilihan Anda dibandingkan partai lain? 37. Bagaimana Anda melihat peluang mencapai tujuan politik tersebut melalui PSI?
		Pembedaan dengan Partai Lain	38. Apakah Anda melihat perbedaan yang jelas antara PSI dan partai politik lain? 39. Perbedaan nilai atau tujuan apa yang paling membedakan PSI dengan partai lain? 40. Apakah perbedaan tersebut memperkuat keputusan Anda untuk memilih PSI?
		Evaluasi Positif dan Citra PSI	41. Citra atau gambaran apa tentang PSI yang paling Anda nilai positif? 42. Apakah citra tersebut sesuai dengan nilai dan tujuan yang Anda anut? 43. Se jauh mana citra positif PSI memengaruhi keputusan Anda untuk menjadi caleg dari PSI?
	Identifikasi Sosial	Penempatan Diri sebagai Bagian dari Kelompok	44. Sejak kapan Anda mulai memandang diri Anda sebagai bagian dari PSI, bukan sekadar simpatisan? 45. Apa makna menjadi bagian dari PSI bagi identitas diri Anda? 46. Apakah keanggotaan di PSI memengaruhi cara Anda memandang posisi diri Anda dalam masyarakat?
		Internalisasi Nilai Kelompok	47. Nilai-nilai PSI apa yang paling Anda rasakan telah menjadi bagian dari cara berpikir dan bersikap Anda? 48. Bagaimana proses Anda menyerap nilai-nilai PSI hingga terasa selaras dengan nilai pribadi Anda?
		Kedekatan Emosional dengan Kelompok	49. Apakah Anda merasakan keterikatan emosional dengan PSI sebagai organisasi politik? 50. Dalam situasi apa Anda paling merasakan kedekatan emosional tersebut? 51. Se jauh mana keterikatan emosional ini memengaruhi komitmen Anda untuk tetap berada di PSI?
		Perbandingan dengan kelompok lain	52. Apakah Anda pernah membandingkan PSI dengan partai politik lain sebelum atau sesudah bergabung? 53. Dalam aspek apa PSI Anda anggap lebih sesuai atau lebih unggul dibandingkan partai lain? 54. Apakah perbandingan tersebut memperkuat Anda bergabung PSI?

		Evaluasi Positif terhadap Kelompok Sendiri	55. Bagaimana Anda menilai posisi PSI dalam lanskap politik terutama di Jakarta saat ini? 56. Apakah penilaian positif ini mempengaruhi rasa bangga Anda sebagai bagian dari PSI?
	Perbandingan Sosial	Evaluasi terhadap partai lain	57. Bagaimana Anda menilai sikap PSI terhadap kader minoritas Kristiani dibandingkan partai politik lain? 58. Menurut Anda, bagaimana posisi PSI dalam memperjuangkan identitas minoritas dibanding partai lain? 59. Apakah anda melihat PSI memberikan ruang partisipasi yang lebih terbuka bagi kader Kristiani dibanding partai lain?

Sumber: Hasil olahan penelitian, tahun 2026

1.9.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Model analisis ini digunakan untuk mengolah data serta temuan lapangan secara sistematis guna menjawab rumusan masalah penelitian. Melalui proses analisis tersebut, data mentah yang diperoleh peneliti diseleksi, diklasifikasikan, dan diorganisasikan sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan serta memotong ataupun menghilangkan data yang tidak relevan dengan penelitian (Huberman, 1994: 10–12). ada beberapa Langkah untuk memproses suatu data dari penelitian diantaranya ;

1. Reduksi Data. Reduksi data adalah proses pemilahan, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi sesuai dengan fokus penelitian. Tahap ini bertujuan untuk menajamkan analisis dengan menghilangkan data yang tidak relevan.
2. Penyajian Data. Penyajian data adalah kegiatan menyusun sekumpulan informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, matriks, bagan, maupun diagram. Melalui

- penyajian data, peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan menentukan langkah analisis selanjutnya.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan proses interpretasi terhadap data yang telah disajikan untuk menemukan makna, pola, hubungan, dan penjelasan dari fenomena yang diteliti. Kesimpulan bersifat sementara dan terus diverifikasi selama penelitian berlangsung melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, sehingga diperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan Teknik Analisis data yang ada diatas maka proses yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan dan memproses data diantaranya;

1. Peneliti melakukan wawancara terhadap calon legislatif yang beragama Kristen di DKI Jakarta yang bergabung dengan Partai PSI pada tahun 2024 guna mengetahui faktor pendorong mereka masuk ke dalam Partai PSI sebagai kendaraan partai politik mereka.
2. Peneliti melakukan wawancara kepada pengurus DPW Partai PSI Jakarta dan PPID PSI Jakarta untuk mendapatkan data terkait pola rekrutmen dan tahapan kaderisasi di dalam Partai PSI terutama bagi anggota ataupun calon legislatif yang beragama Kristen.
3. Peneliti melakukan studi dokumentasi terkait jumlah calon legislatif yang beragama Kristen dari Partai PSI di tahun 2024 melalui laman Digital KPU, melakukan beberapa pengumpulan data pendukung seperti kondisi demografis di DKI Jakarta dalam laman digital BPS.
4. setelah data wawancara yang didapatkan baik dari pihak PSI dan pihak calon legislatif dari Partai PSI, peneliti melakukan pemilihan data hasil wawancara yang bisa menjawab dengan tepat hasil penelitian dan juga menjabarkan

dalam bentuk naratif serta menginterpretasikan menggunakan teori yang sejalan dengan seperti teori identitas sosial yang membahas faktor penyebab calon legislatif Kristen masuk ke partai PSI

1.10 Sistematika Penulisan

Dalam Penelitian ini ada pokok dasar di setiap bab untuk memberikan penjelasan dan pembahasan tentang analisis kandidat Kristen Pemilihan Legislatif Jakarta 2024 Partai Solidaritas Indonesia sebagai Partai Pengusung.

BAB I PENDAHULUAN; Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN; Pada bab ini terdiri dari penjelasan tentang profil dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) latar belakang berdirinya partai, visi dan misi partai, struktur organisasi partai, demografi DKI Jakarta, jumlah umat beragama di DKI Jakarta, Jumlah Calon Legislatif beragama Kristen di tingkat DPRD

BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PILIHAN POLITIK CALON LEGISLATIF KRISTEN MEMILIH PSI SEBAGAI KENDARAAN POLITIK DI PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024; Bab ini membahas secara mendalam hasil penelitian faktor-faktor yang memengaruhi calon legislatif (caleg) Kristen dalam memilih PSI sebagai kendaraan politik pada

Pemilu Legislatif 2024 di DKI Jakarta. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dengan teori yang digunakan telah dijelaskan pada Bab I.

BAB IV PROSES REKRUTMEN DAN KADERISASI ANGGOTA PARTAI PSI YANG BERAGAMA KRISTEN DI DKI JAKARTA;

Pada Bab ini akan membahas tentang bagaimana proses rekrutmen dan juga kaderisasi dari partai PSI terhadap anggota yang beragama Kristen dan juga menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi para caleg yang beragama Kristen untuk bergabung ke partai PSI.

BAB V PENUTUP; Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai proses rekrutmen dan kaderisasi anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang beragama Kristen serta faktor-faktor yang memengaruhi caleg Kristen bergabung dengan PSI sebagai partai politik pengusung dalam Pemilu Legislatif 2024 di DKI Jakarta.